



Judul : Penaikan Utang Disetujui DPR
Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

Penaikan Utang Disetujui DPR

KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan peningkatan utang Indonesia yang terjadi selama pandemi covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. DPR turut bertanggung jawab lantaran pengadaan utang itu diterima dan disetujui oleh parlemen.

“Pengadaan utang terjadi bukan tanpa alasan. Itu terjadi karena paksaan kondisi dan situasi. Hidup rakyat harus diselamatkan dan ekonomi harus diselamatkan. Karena itu, DPR menyetujui utang itu. Jadi, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab DPR,” katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, kemarin.

Pengadaan utang di masa pandemi, lanjut Said, dalam rangka memenuhi kewajiban negara melindungi rakyatnya. Karena itu, peningkatan utang yang terjadi tidak melanggar perundang-undangan dan batas maksimal yang ditetapkan.

Saat ini rasio utang Indonesia berada di angka 40,49% ter-

hadap produk domestik bruto (PDB), relatif aman dari ambang batas di angka 60% terhadap PDB.

“Maksimal (utang) 60% dari PDB. Bagi pemerintah, bagi Banggar, hukum tertinggi ialah keselamatan rakyat. Barangkali kalau tidak ada covid, tahun 2022 keseimbangan primer kita sudah positif,” imbuh Said.

Di kesempatan yang sama, anggota Banggar DPR Hamka Kady mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara di tahun 2022. Salah satunya dengan memanfaatkan pos penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

“Meningkatkan penerimaan negara yang optimal, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai, misalnya pemberlakuan pengenaan cukai kantong plastik,” kata Hamka.

Pengambil kebijakan juga diminta untuk memperluas basis penerimaan kepabeanan dan cukai sembari mengembangkan pelayanan berbasis digital yang fokus pada *user experience* dan *user friendly*. (Mir/E-2)